



Postgraduate Bosowa University Publishing (PBUP)

Indonesian Journal of Business and Management

e-ISSN: 2460-3767 p-ISSN: 2656-6885

<https://postgraduate.universitaspbosowa.ac.id/index.php/jbm>



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR

Analysis Of The Effectiveness And Efficiency Of The Implementation Of The Expenditure Budget At The Regional Financial And Asset Management Agency Of The City Of Makassar

Lira Pappa*, Firman Menne, Seri Suriani

Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*Email: andi.awal1971@gmail.com

Diterima: 22 Agustus 2023/Disetujui: 30 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Fokus dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Pengumpulan data menggunakan teknik data sekunder yaitu data yang bersifat kuantitatif, selama lima tahun terakhir dari 2018-2022 yang diperoleh dari dokumen laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dari tahun 2018-2022 bervariasi. Di mana pada tahun 2018 masuk dalam kriteria cukup efektif, tahun 2019, 2020, 2021 masuk kriteria efektif, tahun 2022 masuk dalam kriteria sangat efektif di karenakan ada beberapa belanja yang ter-realisis melebihi yang dianggarkan sehingga realisasi anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan target anggaran belanja. Serta pelaksanaan anggaran belanja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar tahun 2018-2022 secara keseluruhan kurang efisien. Ini dikarenakan pengelolaan anggaran belanja belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Efektivitas, Efisiensi

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the effectiveness and efficiency of the implementation of expenditure budget at the regional financial and asset management agency of the city of Makassar. This study focused on the the budget realization report on the effectiveness and efficiency of the expenditure budget at the regional financial and asset management agency of the city of Makassar. Data collection used secondary data techniques, namely quantitative data, for the five last years 2018-2022 obtained from the revenue and expenditure budget realization report document the effectiveness and efficiency of the implementation of the expenditure budget at the regional financial and asset management agency of the city of Makassar. The result of this study showed that the level or criteria for budget effectiveness on effectiveness and efficiency of expenditure budget implementation at the regional financial and asset management agency of the city of Makassar from 2018-2022 varied. Where in 2018 it was categorized as moderately effective criteria, in 2019, 2020, 2021 it was categorized as effective criteria, in 2022 it was categorized as highly effective criteria because there were some expenditures realized than expenditure budget targets. Also the implementation of the expenditure budget, the effectiveness and efficiency of the implementation of the expenditure budget at the regional financial and asset management agency of the city of Makassar as a whole was less efficient. This is because the management of the expenditure budget has no succeeded in meeting the efficiency requirements, namely the use of the minimum funds to achieve maximum results.

Keywords: Budget realization Report, Effectiveness, Efficiency



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan yang paling mendasar dalam pemenuhan kebutuhan program setiap institusi atau unit kegiatan adalah ketersediaan anggaran yang kemudian disalurkan pada setiap sisi program yang disediakan atau program yang direncanakan dengan melalui pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan/akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan. Melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa uang atau dana publik telah dibelanjakan secara efisien, dan efektif, dengan demikian susunan pemerintahan dari sistem lama sangat dibutuhkan guna terwujudnya pemerintahan yang dapat dikatakan baik dimana pemerintah pusat yang kuat dalam memutuskan kebijakannya.

Susunan baru ini membutuhkan sistem untuk mengurangi adanya ketergantungan antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan serta mampu mengatur daerah sehingga mereka mampu bersaing baik secara regional, nasional ataupun internasional. Hal ini bertujuan guna memungkinkan daerah mengurus serta mengendalikan urusan pemerintahannya sendiri supaya berguna serta sukses dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berfokus pada kepuasan terhadap masyarakat. Tuntutan lain timbul supaya organisasi pemerintahan mampu mencermati value for money yang menuntut pemerintahan harus bijak didalam pengadaan serta alokasi sumber daya, efisiensi didalam penggunaan sumber daya yang mana berarti pemakaian sebisa mungkin diminimalkan serta hasilnya dioptimalkan, dan efektif dalam arti agar dapat tercapai seluruh tujuan yang telah diharapkan. (Yunina, 2019)

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang, dengan demikian anggaran belanja dikatakan efektif jika anggaran belanja tersebut bisa terserap untuk menjalankan program-program atau kegiatan organisasi. Selain itu anggaran belanja dikatakan efisien jika output atau hasil yang didapatkan dari anggaran belanja tersebut bisa melebihi target dari program atau kegiatan organisasi tersebut (Mardiasmo, 2018).

Efisiensi dan efektivitas dapat digunakan untuk mengamati bagaimana kondisi keuangan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, apakah telah dilaksanakan dengan ekonomis, menguntungkan, serta digunakan dengan sewajarnya dan memenuhi target dan hasil pencapaian tersebut memiliki kerasionalan terhadap sumber yang digunakan. Organisasi sektor publik dianggap baik

apabila pihak yang terlibat bisa melaksanakan seluruh tugasnya yang juga berkaitan terhadap capaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan biaya relatif rendah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar mengalami beberapa kali perubahan penjabaran APBD TA 2021. Perubahan penjabaran APBD TA 2021 antara lain : Penyesuaian sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (TA 2020), penyesuaian belanja tidak terduga sebagai dampak dari pandemic Covid-19, penyesuaian petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik, recofunding pendapatan dan belanja daerah sebagai dampak pandemic covid-19, penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan besaran tambahan penghasilan pegawai, serta recofocusing belanja daerah dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlah anggaran pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar sebesar Rp.96.882.000.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp.286.287.428.698,- dengan realisasi sebesar Rp.243.777.152.106,- atau 85,15%. (sumber LAKIP 2021).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang dikaji secara kuantitatif. Dalam hal ini dipaparkan kondisi keuangan dan posisi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Makassar, yaitu menguraikan dan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Makassar. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti ingin menguji efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan data laporan realisasi anggaran dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Makassar.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan, untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang beralamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Kota Makassar.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Adapun yang ditetapkan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk keperluan penelitian. Mengingat populasi dari penelitian ini sangat luas, maka penulis mengambil

sampel yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yaitu data yang bersifat kuantitatif, selama tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 hingga 2021 yang diperoleh dari dokumen realisasi anggaran atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Dalam proses pengumpulan data, penulis mengadakan studi kasus dan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban baru sebagai organisasi pemerintahan adalah selalu memperhatikan value for money, bersamaan dengan adanya tuntutan yang diterapkan masyarakat dimana harus selalu mengutamakan tanggung jawabnya terkait dilaksanakannya value for money yang terkait pengadaan serta alokasi sumber daya dengan artian penggunaannya dibuat seminimal mungkin namun dapat menciptakan hasil yang maksimal dengan itu diperlukannya juga laporan keuangan yang bertujuan secara luas guna berperan sebagai laporan keuangan untuk nantinya digunakan sebagai pemenuh kebutuhan pengguna dari laporan dalam rangka pencapaian ini, selanjutnya ditetapkan semua pertimbangan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkaitan dengan penyajian dari laporan keuangan, persyaratan serta susunan laporan keuangan, juga isi dari laporan keuangan (Abarca, 2021) maka hasil dari laporan tersebut terbentuknya realisasi anggaran yang dimana laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
- c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas

kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, akan merupakan factor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Berikut ini adalah faktor penentuan efektif dan efisien:

- a) Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana;
- b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktur maupun fungsional;
- c) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
- d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat. Faktor pimpinan berperan penting dalam mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. (Rondonuwu, 2011).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar terletak pada provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu instansi pemerintahan yang membantu tugas presiden dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Tentunya dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar menggunakan anggaran belanja dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Pelaksanaan anggaran yang kurang baik akan berdampak terhadap anggaran belanja yang ter hutang. Kecenderungan yang terjadi pada Kabupaten/Kota terkait perencanaan anggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah adanya penyelewengan terhadap dana APBD seperti korupsi dana anggaran, ketimpangan yang terjadi terkait adanya pengeluaran-pengeluaran yang melebihi anggaran, serta adanya pengelembungan (mark up) belanja dari belanja wajar dan masih banyak lagi penyimpangan yang mungkin terjadi terkait anggaran pemerintah daerah.

a. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Hasil analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.
Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar 2022

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2018	1.431.095.698.296	1.183.743.627.390	82,71	Cukup Efektif
2019	1.537.919.546.412	1.409.852.830.087	91,67	Efektif
2020	1.373.779.867.750	1.329.042.084.063	96,74	Efektif
2021	1.292.330.332.010	1.198.701.815.095	92,75	Efektif
2022	1.324.056.517.490	1.343.057.373.501	101,43	Sangat Efektif

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018-2022 selalu mengalami peningkatan persentase dan perubahan kriteria efektivitas dari cukup efektif menjadi sangat efektif. Dimana pada tahun 2018 kriterianya cukup efektif, tahun 2019, 2020 dan 2021 kriterianya efektif dan tahun 2022 kriteria efektivitasnya menjadi sangat efektif analisis efektivitas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 82,71% (Cukup Efektif), hal ini terjadi karena adanya belanja yang realisasinya hanya sebesar 57,87% jauh sedikit dibandingkan dengan target. Anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.820.000.000 dengan realisasi hanya sebesar Rp.474.500.000 selain itu belanja jalan, irigasi, dan jaringan juga ter-realisasi hanya sebesar 64,20% dari anggaran Rp.314.340.101.090 realisasi Rp. 201.820.265.582.

Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 91,67% (Efektif). hal ini terjadi karena adanya belanja yang realisasinya hanya sebesar 55,06% jauh sedikit dibandingkan dengan target. Anggaran belanja bunga sebesar Rp.70.000.000 dengan realisasi hanya sebesar Rp.38.540.093,20 selain itu belanja tak terduga juga ter-realisasi hanya sebesar 21,26% dari anggaran Rp.4.000.000.000 dengan realisasi Rp.850.527.000.

Tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 96,74% (Efektif) meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2017 terdapat anggaran yang ter-realisasikan hanya sebesar 7,41% yaitu belanja modal aset lainnya dengan target Rp.270.000.000 realisasi hanya Rp.19.999.000. Belanja bunga yang ter-realisasi hanya sebesar 23,49% dari target anggaran Rp.70.000.000 realisasi Rp.16.439.758,94. Serta terdapat juga belanja tak terduga yang terrealisasi 60% dari target anggaran Rp.2.790.917.235 realisasi Rp.1.674.586.960,90.

Tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 92,75% (Efektif). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan nilai persentase efektivitas tetapi kriterianya tetap sama, hal ini disebabkan karena adanya anggaran belanja ditahun 2020 yang tidak ditargetkan ditahun 2021, yaitu belanja bunga dan belanja modal aset lainnya.

Tahun 2022 tingkat efektivitas sebesar 101,43% (Sangat Efektif) pada tahun ini mengalami peningkatan efektivitas yang sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya, ditahun ini realisasi anggaran tinggi dibandingkan target anggaran adalah modal peralatan dan mesin dengan tingkat realisasi sebesar 103,37% dari anggaran Rp.51.409.356.061 realisasi Rp.53.143.236.699 dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ter-realisasi 130,93% dari anggaran sebesar Rp.204.716.299.514 realisasi sebesar Rp.268.021.270.858,99.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018-2022 selalu mengalami perubahan nilai persentase. Pada tahun 2018 persentase efektivitas anggaran belanja sebesar 82,71% (Cukup Efektif), selanjutnya tahun 2019, 2020 dan 2021 memiliki persentase efektivitas anggaran belanja diatas 90% yang di keriteriakan efektif yaitu pada tahun 2019 memiliki persentase sebesar 91,67%(Efektif), tahun 2020 memiliki persentase sebesar 96,74% (Efektif), serta pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 92,75% (Efektif), walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai persentase dari tahun sebelumnya, tetapi tetap di kriteriakan efektif, dan pada tahun 2022 memiliki peningkatan persentase efektivitas anggaran belanja sebesar 101,43% (Sangat Efektif). Hal yang menyebabkan analisis efektivitas ini cukup efektif hingga sangat efektif karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai akan memengaruhi kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Jika realisasi anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran belanja, maka semakin efektif pelaksanaan belanja anggaran.

b. Analisis efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

Hasil analisis efisiensi pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar 2022 dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2.
Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
2018	1.157.174.522.321,16	1.183.743.627.390,03	97,75	Kurang Efisien
2019	1.361.551.580.993,92	1.409.852.830.087,12	96,57	Kurang Efisien
2020	1.271.861.580.055,50	1.329.042.084.063,98	95,69	Kurang Efisien

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
2021	1.131.894.864.517,40	1.198.701.815.095,47	94,42	Kurang Efisien
2022	1.304.798.299.879,50	1.343.057.373.501,56	97,15	Kurang Efisien

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat kita lihat bahwa efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018- 2022 tidak mengalami perubahan yang baik tiap tahunnya, dimana kriteria efisiensinya selalu sama tiap tahunnya yaitu kurang efisien. analisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan persentase tetapi memiliki kriteria yang sama. Tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 97,75% (Kurang Efisien), hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 85,45% dengan realisasi sebesar Rp.557.744.872.753, belanja barang dan jasa memiliki persentase 95,12% dengan realisasi sebesar Rp.266.504.553.744,48 dan belanja modal memiliki persentase 70,97% dengan realisasi sebesar Rp. 332.925.095.823,68.

Tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 96,57% (Kurang Efisien) meskipun persentase-nya menurun dari tahun sebelumnya tetapi penggunaan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun ini memiliki persentase yang tinggi, hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 92,03% dengan realisasi sebesar Rp.596.342.285.498, belanja barang dan jasa memiliki persentase 92,95% dengan realisasi sebesar Rp.313.165.954.329,28 dan belanja modal memiliki persentase 90,64% dengan realisasi sebesar Rp.452.043.341.166,64.

Tahun 2020 tingkat efisiensi sebesar 95,69% (Kurang Efisien) sama seperti tahun sebelumnya yang mengalami penurunan persentase efisiensi tetapi mengalami peningkatan persentase penggunaan realisasi anggaran belanja langsung, hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 97,91% dengan realisasi sebesar Rp.540.842.389.359, belanja barang dan jasa memiliki persentase 96,73% dengan realisasi Rp.360.168.263.635,64 dan belanja modal memiliki persentase 95,38% dengan realisasi sebesar Rp.370.850.927.060,90.

Tahun 2021 tingkat efisiensi sebesar 94,42% (Kurang Efisien), hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 97,38% dengan realisasi sebesar Rp.588.884.977.023,30, belanja barang dan jasa memiliki persentase 92,66% dengan realisasi sebesar Rp.326.639.488.005,95 dan belanja modal memiliki persentase 85,45% dengan realisasi sebesar Rp.213.370.399.448,22.

Tahun 2022 tingkat efisiensi sebesar 97,15% (Kurang Efisien) pada tahun ini mengalami peningkatan persentase efisiensi dari tahun sebelumnya serta mengalami peningkatan penggunaan realisasi anggaran

belanja langsung, hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung di mana belanja pegawai memiliki persentase 97,65% dengan realisasi sebesar Rp.612.418.860.600, belanja barang dan jasa memiliki persentase 93,13% dengan realisasi sebesar Rp.307.347.280.366,27 dan belanja modal memiliki persentase 117,95% dengan realisasi sebesar Rp. 385.032.158.912,69. Sehingga analisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja periode 2015-2019 masuk dalam kriteria kurang efisien karena dari belanja langsung ini dapat mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja menjadi kurang efisien jika penggunaan realisasi anggaran belanja langsung begitu besar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dari tahun 2018-2022 mengalami perubahan persentase setiap tahunnya namun memiliki kriteria efisiensi yang sama. Di mana pada tahun 2018 persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 97,75% (kurang efisien), tahun 2019 persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 95,57% (kurang efisien), tahun 2020 persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 95,69% (kurang efisien), dan tahun 2021 persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 94,42%. Meskipun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berturut - turut mengalami penurunan nilai persentase efisiensi anggaran belanja, namun tidak mengalami perubahan dalam kriteria efisiensi. Serta pada tahun 2022 mengalami peningkatan nilai persentase efisiensi anggaran belanja sebesar 97,15% (kurang efisien). Hal yang menyebabkan analisis efisiensi ini kurang efisien selama 5 (lima) tahun berturut-turut karena realisasi anggaran belanja langsung dapat mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja menjadi kurang efisien jika penggunaan realisasi anggaran belanja langsung begitu besar, di mana pada tahun 2018 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan realisasi anggaran sebesar 85,45%, dan belanja barang dan jasa sebesar 95,12%. Tahun 2019 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan realisasi anggaran sebesar 92,03%, dan belanja modal sebesar 90,64%.

Tahun 2020 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan realisasi anggaran sebesar 97,91% dan belanja barang dan jasa sebesar 96,73%. Pada tahun 2021 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan realisasi anggaran sebesar 97,38% dan belanja barang dan jasa sebesar 92,66%. Serta pada tahun 2022 yang mempengaruhi tingkat efisiensinya yaitu realisasi belanja pegawai yang menunjukkan nilai penggunaan realisasi anggaran sebesar 97,65% dan

belanja modal sebesar 117,95%. Jika dilihat dari penggunaan realisasi anggaran belanja langsung tiap tahunnya, realisasi anggaran belanja pegawai dan realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang lebih dominan mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar. Pengelolaan anggaran belanja ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, dapat di lihat dari hasil pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi sebagai berikut: Tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar pada tahun 2018-2022 mempunyai kriteria efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2022 dan yang terendah terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 kriteria efektivitas nya cukup efektif, pada tahun 2019, 2020, 2021 kriteria efektivitas nya efektif dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kriteria efektivitas yang sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif, Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar tahun 2018-2022, secara keseluruhan belum dikelola secara baik. Di mana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2018-2022 kriteria nya kurang efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

Menilai dari segi efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar agar mempertahankan tingkat efektivitas yang tiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat baik di mana tingkat kriteria dari cukup efektif menjadi kriteria yang sangat efektif, untuk tingkat efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar agar lebih meningkatkan tingkat efisiensi pada tahun yang akan datang dengan melakukan penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, Ifat. (2018). Standar Akuntansi Pemerintahan. Cetakan Pertama. Ilmu. -Jakarta.
- Halim Abdul.2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat salemba.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. C.V Andi offset. Yogyakarta.
- Rondonuwu, Ritno H. (2011). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan daerah Pada

- Dinas Pendapatan Daerah KabupatenMinahasa. Jurnal EMBA 3(4) 001 142.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Ulum, Ihyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. UMM Press. Malang
- Yunina, F. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 9(1), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>
- Yunina, F., & Jumiati. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah. 9(1), 1–12.
- Waney, C.K., D.P.E. Saerang dan S.W. Alexander. (2018). Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concert 13(2): 334-341.